



Persepsi Generasi Muda terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan Dampak Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

Aisyah Larasati Tambunan^{1*}, Desliana Dwi Tamalia², Divi Humairah³, Enggar Fibianingtyas⁴, Ratna Indriani⁵, Silvia May Jesica⁶, Zahralia Albraina⁷, Khoiriyah Ulfah⁸

¹⁻⁸Prodi Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: Aaisyah.tambunan123@gmail.com¹, deslianatamalia@gmail.com², divihumairah@gmail.com³, fibianingtyasenggar@gmail.com⁴, silviajessika0088@gmail.com⁵, ratnaindriani962@gmail.com⁶, zahraliaalbraina@gmail.com⁷, khoiriyahulfah@radenintan.ac.id⁸

*Penulis Korespondensi : Aaisyah.tambunan123@gmail.com

Abstract. *This study examines young people's perceptions of the Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis/MBG) and its impact on public trust in the government. The MBG program is one of the Indonesian government's strategic policies aimed at improving nutritional quality, particularly for students, while supporting social welfare and human resource development toward Indonesia Emas 2045. In the digital era, social media plays a significant role in shaping public opinion, especially among Generation Z, who actively consume and disseminate information through online platforms. This research employed a qualitative descriptive approach with in-depth interviews, social media observations, and documentation studies as data collection techniques. The participants consisted of young people aged 18–25 years in Bandar Lampung selected through purposive sampling. The findings indicate that most informants perceive the MBG program positively because it is considered relevant to community needs, particularly in improving children's nutrition and supporting economically vulnerable groups. However, public trust in the government remains conditional due to concerns regarding transparency, uneven distribution, food quality, and program supervision. The study also reveals that young people distinguish between support for the program itself and trust in the government as an institution. Positive perceptions of the program can increase political trust, but implementation weaknesses may reduce confidence in government performance. Therefore, transparency, consistency, and effective public communication are essential factors in strengthening public trust and ensuring the sustainability of the MBG program.*

Keywords: *Digital Media; Free Nutritious Meal Program; Generation Z; Political Trust; Public Perception.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi generasi muda terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dampaknya terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, sekaligus mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Di era digital, media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik, terutama di kalangan Generasi Z yang aktif mengakses dan menyebarkan informasi melalui platform digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi media sosial, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari generasi muda berusia 18–25 tahun di Bandar Lampung yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan memandang program MBG secara positif karena dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan gizi anak dan membantu kelompok ekonomi rentan. Namun, kepercayaan publik terhadap pemerintah masih bersifat kondisional karena adanya persoalan terkait transparansi, pemerataan distribusi, kualitas makanan, dan pengawasan pelaksanaan program. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa generasi muda mampu membedakan antara dukungan terhadap program dan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai institusi politik. Persepsi positif terhadap program dapat meningkatkan kepercayaan politik, tetapi kelemahan implementasi berpotensi menurunkan keyakinan terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, transparansi, konsistensi implementasi, dan komunikasi publik yang efektif menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga keberlanjutan program MBG.

Kata kunci: Generasi Z; Kepercayaan Politik; Media Digital; Persepsi Publik; Program Makan Bergizi Gratis.

1. LATAR BELAKANG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga dipandang sebagai langkah jangka panjang dalam mempersiapkan generasi yang sehat, produktif, dan mampu mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga dipandang sebagai langkah strategis jangka panjang dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui program MBG, pemerintah berharap dapat membantu mengurangi permasalahan stunting, meningkatkan fokus belajar siswa, serta memperkuat kualitas generasi muda Indonesia di masa mendatang (Pora et al., 2025). Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas pemerataan akses terhadap kebutuhan gizi dasar bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, program MBG menjadi perhatian besar masyarakat, terutama generasi muda yang aktif menggunakan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi dan menyampaikan opini. Generasi muda cenderung lebih cepat memberikan respons terhadap kebijakan pemerintah karena tingginya intensitas penggunaan platform digital seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter). Informasi yang beredar di media sosial dapat membentuk persepsi positif maupun negatif terhadap program pemerintah, termasuk program MBG. Persepsi tersebut muncul dari penilaian masyarakat terhadap kualitas makanan, transparansi pelaksanaan program, pemerataan distribusi, serta efektivitas kebijakan yang dijalankan pemerintah (Kiftiyah et al., 2025).

Persepsi generasi muda terhadap program pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sendiri. Kepercayaan publik merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan kebijakan publik karena dapat memengaruhi dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah. Ketika masyarakat menilai program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata, maka tingkat kepercayaan publik akan meningkat. Sebaliknya, apabila muncul berbagai persoalan seperti kurangnya pengawasan, kualitas makanan yang dipersoalkan, atau informasi yang tidak transparan, maka hal tersebut dapat menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sugiharto et al., 2025).

Fenomena tersebut terlihat dari banyaknya opini publik di media sosial yang membahas program MBG, mulai dari apresiasi terhadap tujuan program hingga kritik mengenai implementasinya. Selain itu, pemberitaan mengenai kendala pelaksanaan program MBG, seperti kualitas makanan yang kurang layak, distribusi yang belum optimal, dan kesiapan

pelaksanaan program di berbagai daerah turut memengaruhi opini masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hal ini, media digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap kebijakan pemerintah (Reza, 2025). Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperkuat komunikasi publik agar program MBG tetap memperoleh dukungan masyarakat dan tidak dipengaruhi oleh hoaks maupun disinformasi di media sosial. Komunikasi publik yang baik dan transparan menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif mengakses informasi digital. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana persepsi generasi muda terhadap program Makan Bergizi Gratis serta dampaknya terhadap kepercayaan publik pada pemerintah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai persepsi generasi muda terhadap program Makan Bergizi Gratis dan dampaknya terhadap kepercayaan publik pada pemerintah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana generasi muda memandang program MBG serta bagaimana persepsi tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi program dan membangun komunikasi publik yang lebih efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Persepsi dan Pembentukan Sikap Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi salah satu unsur penting dalam keberhasilan kebijakan publik. Dalam hal ini, cara pemerintah menyampaikan informasi memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana masyarakat membentuk penilaian (Husaini, 2024). Dalam kajian perilaku organisasi, Robbins & Judge (2017) menjelaskan bahwa individu cenderung menyaring dan menafsirkan informasi sesuai nilai, pengalaman, dan kepentingan yang sudah dimiliki sebelumnya melalui mekanisme persepsi selektif (*selective perception*), sehingga kelompok yang berbeda dapat membentuk persepsi yang berbeda pula terhadap kebijakan yang sama. Hal ini menjadi landasan penting untuk memahami mengapa program MBG, meski memiliki tujuan yang sama, dapat diterima secara berbeda-beda di kalangan generasi muda Indonesia.

Generasi Z sebagai Aktor Sosial di Era Digital

Generasi Z merupakan kelompok individu yang terlahir antara tahun 1997 hingga 2012 dan tumbuh dalam ekosistem digital secara penuh (Global, 2023). Kemudahan akses informasi membuat generasi ini cepat mengetahui isu sosial maupun politik yang sedang berkembang.

Namun, tingginya intensitas penggunaan media sosial juga membuat Generasi Z lebih mudah terpapar informasi yang belum tentu benar. Kondisi tersebut menyebabkan persepsi generasi muda terhadap kebijakan pemerintah sering kali dipengaruhi oleh informasi yang mereka temukan di ruang digital. Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider menjelaskan bahwa pengalaman yang berbeda memberikan pengaruh kuat dalam membentuk persepsi, keputusan, dan perilaku yang juga berbeda, sehingga teori ini sangat relevan untuk memahami perilaku dan berbagai alasan di balik tindakan yang dilakukan oleh Generasi Z ketika menyikapi informasi tentang kebijakan pemerintah yang tersebar di media sosial (Kalista et al., 2024).

Penelitian terhadap peranan terpaan media sosial Instagram dan TikTok pada Generasi Z dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang menemukan bahwa meskipun Generasi Z memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya keterbukaan informasi dan mendominasi penggunaan Instagram (51,90%) serta TikTok (46,84%) berdasarkan data APJII 2024, keterlibatan aktif mereka dengan konten resmi pemerintah masih tergolong moderat karena tantangan dalam literasi digital, ketidakakuratan informasi di media sosial, serta persepsi negatif terhadap kredibilitas informasi pemerintah; temuan ini juga mengindikasikan kesenjangan interaksi antara generasi muda dan pemerintah yang disebabkan oleh kurangnya respons pemerintah sehingga Generasi Z merasa kecewa dan enggan berpartisipasi aktif dalam diskusi publik (Putri & Marom, 2025). Dengan demikian, persepsi Generasi Z terhadap program MBG tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekosistem informasi digital yang mereka huni sehari-hari.

Kepercayaan Publik (Public Trust) terhadap Pemerintah

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan konsep sentral dalam ilmu administrasi publik. Kepercayaan publik menjadi variabel kunci dalam keberhasilan implementasi program pemerintah, mengacu pada Mayer et al., (1995) kepercayaan publik terbentuk berdasarkan persepsi terhadap tiga dimensi utama, yaitu ability (kapasitas pemerintah dan SPPG dalam menyediakan makanan bergizi sesuai standar), benevolence (niat baik pemerintah untuk meningkatkan kesehatan siswa), dan integrity (konsistensi, keterbukaan, dan kejujuran dalam pelaksanaan program), di mana dalam konteks MBG kepercayaan publik diwujudkan melalui transparansi daftar penerima manfaat, pelaporan penggunaan bahan pangan, pengawasan kualitas menu, serta keterlibatan orang tua dan sekolah dalam proses verifikasi (Afriaji, 2026).

Sejalan dengan itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi, respons yang lambat, dan kegagalan dalam membangun narasi yang kredibel memperparah krisis kepercayaan publik, di mana peran humas pemerintah menjadi semakin krusial dalam mengelola dinamika opini publik di era digital yang ditandai dengan fenomena cancel culture

dan ekspresi ketidakpercayaan massal di media social (Irhamdhika et al., 2025). Lebih lanjut, beberapa faktor utama yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap transparansi kebijakan pemerintah adalah ketidakkonsistenan informasi pemerintah, peningkatan disinformasi digital, dan ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap keterbukaan, di mana penurunan kepercayaan ini berdampak pada berkurangnya penerimaan kebijakan, menurunnya partisipasi publik, dan meningkatnya kerentanan terhadap narasi alternatif di dunia digital (Rosidah et al., 2023)

Peran Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik terhadap Kebijakan

Media sosial telah bertransformasi menjadi arena utama pembentukan opini publik, khususnya di kalangan generasi muda Indonesia. Media sosial, seperti Facebook, WhatsApp Group sekolah, Instagram, dan kanal resmi pemerintah daerah, berfungsi sebagai platform yang mampu menyebarkan informasi secara cepat, luas, dan interaktif; dalam konteks tata kelola program, media sosial mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan, namun pemanfaatannya juga menghadapi tantangan berupa risiko misinformasi dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi sehingga keberadaan kanal resmi sangat penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat valid dan konsisten (Afriaji, 2026).

Pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui penyebaran informasi yang cepat dan luas. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana interaktif yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meski demikian, masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital, yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk memperluas akses internet, meningkatkan edukasi literasi digital, serta menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif agar penggunaan media sosial dapat berjalan secara optimal (Haryadi, 2024). Dalam hal ini, penguatan literasi digital bagi guru, orang tua, dan masyarakat menjadi faktor penting agar media sosial dapat dimanfaatkan secara bijak sebagai sarana komunikasi kebijakan, di mana integrasi media sosial ke dalam strategi komunikasi MBG berkontribusi pada peningkatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga kepercayaan publik terhadap program semakin kokoh (Afriaji, 2026).

Komunikasi Kebijakan dan Penguatan Legitimasi Program

Komunikasi kebijakan merupakan determinan penting yang memengaruhi sejauh mana program dapat dipahami, diterima, dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks MBG, salah satu tantangan krusial adalah fragmentasi informasi di antara berbagai

pemangku kepentingan, yang tampak dari masih terdapatnya perbedaan versi penjelasan terkait standar menu gizi, jadwal distribusi, mekanisme laporan, hingga isu-isu sensitif seperti kualitas bahan makanan atau proses seleksi penyedia layanan; ketidaksinambungan arus informasi ini dapat memicu distorsi pesan, ketidaksesuaian persepsi kebijakan, dan keraguan publik terhadap kredibilitas pelaksana program (Afriaji, 2026). Untuk menjawab tantangan tersebut, temuan penelitian menunjukkan bahwa model strategi komunikasi kebijakan 3K yang bersifat Komprehensif melalui integrasi saluran formal dan informal, Kontekstual melalui penyesuaian pesan dengan sosial-budaya lokal, serta Kolaboratif melalui pelibatan multipihak termasuk SPPG, sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, dan media lokal mampu meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan serta membangun kepercayaan publik terhadap program MBG secara berkelanjutan (Afriaji, 2026)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat pandangan generasi muda mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap opini, pengalaman, dan penilaian sosial individu mengenai kebijakan publik yang sedang banyak dibahas di masyarakat (Creswel, 2014).

Partisipan penelitian terdiri dari generasi muda berusia 18–25 tahun di Bandar Lampung. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih partisipan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Seluruh informan merupakan individu yang mengikuti perkembangan program MBG melalui media sosial, berita, maupun lingkungan sekitar (Moleong, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan pada media sosial, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengetahui pendapat informan mengenai tujuan, pelaksanaan, manfaat, serta pengaruh program MBG terhadap masyarakat dan pemerintah. Selain itu, observasi media sosial dilakukan untuk melihat bagaimana opini generasi muda terbentuk melalui informasi yang beredar di platform digital. Dokumentasi diperoleh dari artikel berita, jurnal ilmiah, dan dokumen pemerintah yang berkaitan dengan program MBG serta kepercayaan publik terhadap pemerintah (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang dibantu dengan pedoman wawancara sebagai alat pengarah selama proses pengumpulan data. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi persepsi generasi muda terhadap program MBG, faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi, serta dampaknya terhadap

kepercayaan publik kepada pemerintah (Miles & Huberman., 2014). Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan hasil penelitian ke dalam beberapa tema utama. Proses analisis dimulai dari menyeleksi data penting, menyusun data secara sistematis, hingga menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan selama penelitian berlangsung (Miles & Huberman, 2014). Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai respon generasi muda terhadap program Makan Bergizi Gratis dan kaitannya dengan kepercayaan publik kepada pemerintah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap empat informan dari kalangan generasi muda. Pengumpulan data dilakukan dalam satu periode penelitian dengan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola persepsi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta implikasinya terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Dalam kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan Teori *Political Trust* dari David Easton, yang menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terbentuk melalui evaluasi terhadap kebijakan publik, kinerja institusi, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, persepsi generasi muda terhadap program MBG tidak hanya merefleksikan penilaian terhadap program itu sendiri, tetapi juga menjadi indikator tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sebagai aktor politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan memandang program MBG sebagai kebijakan yang positif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan gizi anak dan membantu kelompok ekonomi menengah ke bawah. Namun demikian, kepercayaan terhadap pemerintah tidak sepenuhnya tinggi karena para informan masih menyoroti berbagai persoalan dalam implementasi program, seperti transparansi, pemerataan, kualitas makanan, dan pengawasan pelaksanaan. Program dinilai positif secara konseptual, namun implementasinya memunculkan evaluasi kritis yang berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik.

Persepsi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penilaian terhadap Relevansi Program

Temuan penelitian menunjukkan bahwa generasi muda memandang program MBG sebagai kebijakan yang relevan dan positif dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan. Program ini dinilai sebagai bentuk intervensi sosial yang konkret dan berorientasi pada kesejahteraan. Pernyataan ini didukung

oleh hasil wawancara terhadap informan yang menunjukkan bahwa seluruh informan menilai program MBG memiliki tujuan yang baik dan dianggap mampu membantu masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan keluarga kurang mampu.

Informan R menyatakan:

“Menurut saya iya, karena program ini tuh fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Terutama pemenuhan gizi, setidaknya tuh adalah usaha dari pemerintah untuk menjawab persoalan yang memang disarankan masyarakat gitu.”

Pernyataan serupa juga diucapkan oleh Informan A:

“Iya cukup sesuai, apalagi kondisi ekonomi sekarang masih susah buat sebagian orang. Anak sekolah memang butuh perhatian soal gizi juga.”

Dan kembali ditegaskan oleh Informan kami bernisial S:

“Menurut saya sesuai sih, terutama buat keluarga menengah ke bawah. Program kayak gini bisa bantu kebutuhan makan anak sekolah dan menurut saya cukup relevan dengan kondisi ekonomi sekarang.”

Begitupula informan kami yang bernisial N menyatakan:

“Kalo untuk saat ini sudah ya karna apalagi khususnya anak anak yang daerah nya itu belum mencangkupi makanan gizi seimbang.”

Berdasarkan jawaban keempat informan kami dapat disimpulkan jika, generasi muda memandang program MBG sebagai program yang relevan. Dalam perspektif *Political Trust*, kondisi ini mencerminkan dimensi *specific support*, yaitu dukungan masyarakat terhadap kebijakan tertentu yang dianggap memberikan manfaat langsung. Informan menilai bahwa program ini memiliki tujuan yang jelas dan menyangar kebutuhan dasar, sehingga menghasilkan penerimaan awal yang cukup tinggi. Temuan ini konsisten dengan penelitian terbaru yang menyatakan bahwa program MBG berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi berbasis sekolah (Yuliani, F et al., 2026).

Selain itu, studi lain menegaskan bahwa kebijakan makan bergizi memiliki efek langsung terhadap kesejahteraan sosial dan kesehatan anak, sehingga meningkatkan legitimasi kebijakan di mata publik (Dirawan & Sukriadi, 2026). Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa penerimaan terhadap program tidak sepenuhnya diikuti oleh kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan terhadap kebijakan tidak selalu berbanding lurus dengan legitimasi institusi politik.

Tabel 1. Persepsi Generasi Muda terhadap Program MBG

Aspek yang Dinilai	Temuan Utama	Interpretasi
Relevansi program	Dinilai sesuai kebutuhan masyarakat	Program memenuhi kebutuhan dasar (gizi)
Manfaat program	Membantu anak dan kelompok rentan	Dampak langsung meningkatkan penerimaan
Persepsi tujuan	Dianggap sebagai aksi sosial	Program dianggap memiliki tujuan baik
Persepsi politik	Sebagian melihat sebagai strategi politik	Mengarah pada evaluasi kritis

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program

Meskipun program dinilai positif, generasi muda secara konsisten menyoroti kelemahan dalam pelaksanaan. Isu utama yang muncul meliputi distribusi yang belum merata, kualitas makanan yang tidak konsisten, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan. Dalam kerangka teori Easton, kondisi ini berkaitan dengan dimensi *diffuse support*, yaitu kepercayaan jangka panjang terhadap sistem politik. Ketika implementasi kebijakan tidak memenuhi ekspektasi, maka kepercayaan terhadap institusi dapat mengalami penurunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian implementasi MBG yang menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada aspek distribusi, koordinasi, dan pengawasan kualitas (Fauzia et al., 2026). Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa isu transparansi dan ketimpangan distribusi menjadi faktor utama munculnya persepsi negatif publik terhadap program ini (Sultoni et al., 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan implementasi berperan sebagai faktor penghambat dalam pembentukan kepercayaan politik.

Dampak Program terhadap Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

Pengaruh terhadap Persepsi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG memiliki pengaruh terhadap cara pandang generasi muda terhadap pemerintah. Informan mengakui bahwa program ini menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam teori Easton, hal ini mencerminkan proses konversi dari evaluasi kebijakan menjadi kepercayaan politik. Ketika kebijakan dinilai positif, maka kepercayaan terhadap pemerintah cenderung meningkat. Namun, proses ini tidak bersifat otomatis.

Sebagian informan menunjukkan sikap hati-hati. Mereka mengapresiasi program, tetapi tetap menilai pemerintah berdasarkan konsistensi pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik bersifat dinamis dan berbasis pengalaman empiris. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap MBG terbagi antara dukungan dan kritik. Analisis sentimen menemukan sekitar 47,1% opini bersifat positif, sementara 41,9% bersifat negatif, terutama terkait transparansi dan distribusi (Sultoni et al., 2025).

Tabel 2. Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Publik

Faktor	Deskripsi Temuan	Dampak terhadap Kepercayaan
Transparansi	Informasi anggaran dan distribusi belum jelas	Menurunkan kepercayaan
Konsistensi pelaksanaan Respons pemerintah	Implementasi belum merata Respons ada, tetapi tidak selalu cepat	Menimbulkan keraguan Mempengaruhi evaluasi publik
Kualitas layanan	Kualitas makanan tidak seragam	Memengaruhi persepsi negatif

Meskipun informan menilai program MBG memiliki tujuan yang baik, sebagian besar informan belum sepenuhnya percaya terhadap pemerintah karena masih adanya persoalan dalam pelaksanaan program. Faktor yang paling sering muncul adalah kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan ketidak konsistenan implementasi di lapangan. Seperti yang dikatakan oleh informan kami berinisial N:

“Saya percaya programnya tapi pengelolaannya itu saya kurang percaya, kalo ga transparansi.” Informan tersebut juga menambahkan pernyataan yang mempertegas opininya, “Kalo MBG nya 80% tapi kalo pemerintah nya 50%.”

Dengan demikian hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa MBG memiliki dua sisi utama, yaitu manfaat sosial yang signifikan dan tantangan implementasi yang kompleks. Temuan ini sejalan dengan teori (Mayer et al., 1995) yang menyebutkan bahwa kepercayaan publik terbentuk melalui tiga aspek utama, yaitu ability, benevolence, dan integrity. Dalam konteks penelitian ini, aspek integrity menjadi perhatian utama informan, terutama terkait transparansi anggaran dan konsistensi pelaksanaan program MBG.

Studi lain menyatakan bahwa MBG merupakan bentuk pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam akses pangan dan pendidikan (Rahman et al., 2025). Namun, penelitian yang terbaru juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan agar program dapat berjalan efektif. Selain itu, penelitian oleh Wibowo & Yuliani (2026) menunjukkan bahwa penelitian terkait program makan sekolah telah berkembang dari fokus desain kebijakan menuju isu keberlanjutan dan efisiensi operasional. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian ini yang menyoroti pentingnya penguatan sistem implementasi.

Implikasi Teoritis dan Praktis

a. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi oleh kualitas implementasi. Hal ini mendukung bahwa Teori *Political Trust* David Easton relevan dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat. Persepsi generasi muda terhadap MBG menunjukkan bahwa kepercayaan tidak bersifat statis, tetapi terbentuk melalui proses evaluasi berkelanjutan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa *specific support* terhadap kebijakan tidak selalu menghasilkan *diffuse support* terhadap sistem politik. Dengan kata lain, masyarakat dapat mendukung program, tetapi tetap kritis terhadap pemerintah.

b. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan program. Kedua, sistem pengawasan harus diperkuat untuk memastikan kualitas dan pemerataan. Ketiga, komunikasi publik perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami tujuan dan mekanisme program. Selain itu, konsistensi implementasi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan generasi muda terhadap pemerintah.

Hasil ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa generasi muda masih memiliki harapan terhadap pemerintah melalui program MBG. Dukungan tersebut muncul karena informan melihat adanya manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, dukungan tersebut bersifat *conditional trust*, yaitu kepercayaan yang bergantung pada konsistensi dan kualitas implementasi program. Jika pemerintah mampu memperbaiki transparansi, pemerataan, dan kualitas pelaksanaan, maka tingkat kepercayaan publik berpotensi meningkat secara lebih kuat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa generasi muda memandang Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan yang cukup positif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program ini dinilai mampu membantu pemenuhan gizi anak sekolah serta memberikan manfaat bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu. Namun, penilaian positif terhadap program belum sepenuhnya membuat generasi muda memiliki kepercayaan penuh kepada pemerintah. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala dalam pelaksanaan program, seperti transparansi yang dinilai belum optimal, distribusi yang belum merata, dan kualitas pelaksanaan yang masih berbeda di beberapa daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada tujuan program, tetapi juga pada konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara terbuka, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta memperbaiki pemerataan dan kualitas pelaksanaan program MBG. Pemerintah juga perlu membangun komunikasi publik yang lebih terbuka dan responsif agar kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat meningkat. Penelitian selanjutnya diharapkan

dapat melibatkan informan yang lebih luas agar hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan beragam.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap aspek keterbukaan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada pengelolaan anggaran, kualitas makanan yang diberikan, serta mekanisme pengawasan program. Transparansi menjadi hal yang penting karena dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sekaligus mengurangi munculnya keraguan maupun kritik terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, pemerataan pelaksanaan program juga perlu ditingkatkan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara setara oleh masyarakat di berbagai daerah tanpa adanya perbedaan kualitas layanan maupun akses penerimaan program.

Pemerintah juga diharapkan mampu membangun komunikasi publik yang lebih terbuka, aktif, dan responsif, khususnya melalui media sosial dan platform informasi resmi yang banyak diakses generasi muda. Penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat memahami tujuan program secara lebih menyeluruh sekaligus meminimalkan penyebaran informasi yang kurang tepat. Di samping itu, evaluasi program secara berkala perlu dilakukan agar berbagai kendala dalam pelaksanaan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki sehingga kualitas program dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar jumlah informan dan cakupan wilayah penelitian diperluas sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan persepsi masyarakat secara lebih beragam terhadap program MBG. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan pembahasan pada aspek lain, seperti pengaruh program terhadap kesehatan, pendidikan, maupun tingkat kepercayaan politik masyarakat dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Kami panjatkan puji syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala rahmat dan karunia-Nya yang memungkinkan saya menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kami sangat menyadari bahwa keberhasilan penyusunan artikel ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa tulus dari banyak pihak. Untuk itu, Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Program Studi Psikologi Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas segala dukungan yang diberikan selama perjalanan penelitian ini. Ucapan terima kasih istimewa juga saya sampaikan kepada Ibu Khoiriyah Ulfa, MA, selaku dosen pembimbing. Beliau telah dengan sabar memberikan

arahan, masukan konstruktif, dan bimbingan yang sangat berharga, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa, penghargaan setinggi-tingginya saya berikan kepada rekan-rekan penulis yang telah merangkum karya sama dan memberikan kontribusi berarti dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih kepada Aisyah Larasati Tambunan, Desliana Dwi Tamalia, Divi Humaira, Enggar Fibianingtyas, Ratna Indriani, Silvia May Jessica, dan Zahralia Albreina atas kolaborasi, dukungan, dan ide-ide cemerlang yang telah diberikan dari awal penelitian hingga artikel ini tuntas. Terakhir, kami juga berterima kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan membagikan informasi penting yang menjadi dasar penelitian ini. Besar harapan kami, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan referensi berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Afriaji, M. (2026). Komunikasi kebijakan dalam meningkatkan kepercayaan terhadap program makan bergizi gratis (MBG) publik, 5(1), 302–311. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5291>
- Anifatul Kiftiyah, Palestina, I. A., Abshar, F. U., & R. K. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1). <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/726>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dirawan, G. D., & Sukriadi, A. (2026). Beyond school feeding: Makan bergizi gratis (MBG) as a life-course nutrition and human capital policy in Indonesia, 0, 99–114.
- Fatimah Yuliani, Juniarsih, W., Prayitno, H. J., & I. (2026). Kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia: Analisis implementasi, dampak terhadap sumber daya manusia, dan implikasinya pada kebijakan sistem pendidikan nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11, 2025–2029.
- Fauzia, M. E., Halimah, Z. N., & H. Y. I. (2026). Analisis implementasi program makan bergizi gratis (MBG) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 10, 182–193. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v10i1.53925>
- Global, D. (2023). *The Deloitte Global 2023 Gen Z and Millennial Survey*. Deloitte Touche Tohmatsu Limited. <https://www.deloitte.com/global/en/about/press-room/2023-gen-z-and-millennial-survey.html>
- Husaini, H. (2024). Peran humas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1, 112–121. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.22>
- Irhamdhika, G., Iman, N., Hidayah, E., Ariska, Y., Ningtyas, D. A., & Sari, A. (2025). Krisis kepercayaan publik: Fenomena #KaburAjaDulu dan peran humas pemerintah dalam merespons cancel culture, 6(April), 7–15. <https://doi.org/10.31294/jpr.v6i1.8663>

- Kalista, A., Badriyah, A., & Salim, N. Z. (2024). Perilaku pengguna media sosial (Generasi Z) pada mahasiswa Surabaya terhadap berita ringkas pemilihan umum 2024 ditinjau dari perspektif teori atribusi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6537>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Sugiharto, Rahma, R. A., & H. R. (2025). Model konseptual penguatan program makan bergizi gratis melalui kualitas pelayanan, informasi, dan kepercayaan publik. *Jurnal Sosial Terapan*, 3(2), 11–12. <https://doi.org/10.29244/v4gxtg18>
- Nanda Aurellia Putri, Marom, A., & S. M. (2025). Peranan terpaan media sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 14, 1–19.
- Pora, S., Muksin, D., & R. A. F. (2025). Implementasi program makan bergizi gratis pada pemerintahan Prabowo-Gibran: Solusi dan tantangan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 635–649. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/4352/2519>
- Rahman, A., Fikri, M., & Maysha, H. M. (2025). Reformasi program makan bergizi gratis untuk pemenuhan hak sosial, 9(1), 82–104.
- Reza, I. F. (2025). Urgensi penjaminan mutu dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis: The urgency of quality assurance in the implementation of the free nutritious meal program. *Jurnal Analis Kebijakan*. <https://doi.org/10.37145/n0a0gb68>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson Education.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. <https://doi.org/10.2307/258792>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sultoni, A., Putra, D. A., Noor, H., Arief, M. M., Jingga, P., & Putria, R. M. (2025). Public sentiment analysis and distribution optimization MBG. *Jurnal Matematika Thales*, 7(1), 35–53.
- Wibowo, A., & Y. (2026). Three decades of school meal program research: Bibliometric insights for governance and sustainability of Indonesia's free nutritional meal initiative (MBG). *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 10(1), 198–218. <https://doi.org/10.36574/jpp.v10i1.745>